

ABSTRAK

Penunjukan gedung sebagai tempat misi diplomatik tidak diatur secara eksplisit dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Pada tahun 2012, Negara Prancis selaku negara penerima, menolak penunjukan bangunan yang terletak di 42 avenue Foch sebagai tempat misi diplomatik Guinea Khatulistiwa. Dari kasus tersebut, Mahkamah Internasional menyusun sebuah kriteria *Three-step Reasonableness Test* (Tes Kewajaran Tiga Langkah) yang terdiri dari unsur tepat waktu, tidak sewenang-wenang, dan non-diskriminatif, untuk menilai penolakan penunjukan gedung diplomatik oleh Prancis. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk menganalisis apa pertimbangan Hakim Mahkamah Internasional dalam menggunakan *Three-step Reasonableness Test* dan bagaimana penerapannya dalam Kasus *Immunities and Criminal Proceedings* berdasarkan Konvensi Wina 1961. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Internasional menggunakan Pembukaan Konvensi Wina 1961 yaitu untuk mempromosikan hubungan baik antar negara serta prinsip itikad baik dalam penyusunan *Three-step Reasonableness Test*. Prancis telah melakukan penolakan penunjukan gedung diplomatik oleh Guinea Khatulistiwa secara tepat waktu, tidak sewenang-wenang, dan bersifat non-diskriminatif.

Kata Kunci: Penunjukan, *Three-step Reasonableness Test*, Tempat misi diplomatik

ABSTRACT

The designation of a building as a premises of the mission is not explicitly regulated in the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. In 2012, France as a receiving state, objected the designation of the building located at 42 avenue Foch as Equatorial Guinea's premises of the mission. From this case, the International Court of Justice developed a criterion (Three-step Reasonableness Test) consisting of timely manner, non-arbitrary, and non-discriminatory to examine France's objection towards the designation of a building as a premises of the mission. Therefore, a study was conducted to analyze the considerations of the Judges of the International Court of Justice in using the Three-step Reasonableness Test and how it is applied in the Immunities and Criminal Proceedings Case based on the 1961 Vienna Convention. This research uses a normative juridical approach with a descriptive specification. This research uses secondary data which was obtained through literature study and was analyzed qualitatively. The research shows that the International Court of Justice used the Preamble of the 1961 Vienna Convention which is to promote friendly relations among nations and the good faith principle in the preparation of the Three-step Reasonableness Test. France has objected the designation of a diplomatic building by Equatorial Guinea in a timely, non-arbitrary, and non-discriminatory manner.

Keywords: Designation, Three-step Reasonableness Test, Premises of the mission